

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	1
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalam

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media :

Halaman :

08

Kompas	Kalteng Pos	Radarsampit
Palangka Post	<input checked="" type="checkbox"/> Tabengan	

# Penyaluran DD Kabupaten Kapuas Disoroti Ditjen PBN

## PALANGKA RAYA, PPOST

Penyaluran dana desa (DD) ke sejumlah desa di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi sorotan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Negara (PBN) wilayah setempat. Tak terkecuali Kabupaten Kapuas.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Negara (PBN) Provinsi Kalimantan Tengah Hari Utomo mengatakan, masih ada kabupaten yang penyalurannya rendah di penghujung tahun ini. Contohnya Kabupaten Kapuas, penyalurannya masih 72,68 persen.

"Kendala penyaluran di Kabupaten Kapuas, karena adanya dua desa yang bermasalah, akhirnya Pemerintah Kabupaten Kapuas menunda penyalurannya ke desa lain," ungkap Hari.

Hari Utomo mengaku sudah berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas agar tetap menyalurkan dana ke desa lainnya. Jangan karena satu desa bermasalah, desa lain terkena dampaknya.

"Dana desa ini sangat penting sekali, untuk kemajuan desa.

Sampai pertengahan November ini penyaluran dana desa se Kalimantan Tengah sudah 83,67 persen," tegasnya.

Selain dana desa di Kabupaten Kapuas, penyerapan

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2021 disejumlah kabupaten jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menjadi catatan. Karena di pertengahan bulan November ini baru menyentuh angka 70,86 persen.

"Kita sudah diperujung tahun, tapi realisasinya masih rendah. Ini tentu menjadi kekhawatiran kita bersama. Harusnya di akhir bulan November ini sudah 75 persen realisasi DAK Fisik," jelas Hari.

Disebutkan Hari, bahwa sampai dengan 18 November 2021 realisasi DAK Fisik paling rendah berada di Pemerintah Kabupaten Kotawarin-

gin Timur yang baru 54,36 persen. "Teruntut pemerintah daerah yang masih belum optimal realisasi DAK Fisik diharapkan bisa bekerja lebih keras lagi mendekati ujung tahun ini. Supaya pemanfaatannya bisa dirasakan masyarakat Kalteng," bebarnya.

Hari Utomo menuturkan, realisasi DAK Fisik yang tidak optimal berdampak kepada masyarakat. Karena pemanfaatan pembangunannya tidak dapat dirasakan masyarakat.

"Kita ambil contoh bangunan sekolah. Jika DAK Fisik tidak optimal. Maka pembangunan sekolah juga akan terhambat atau justru tidak terbangun," timpalnya.

Hari Utomo menambahkan, pendapatan negara di Kalimantan Tengah sampai dengan 18 November 2021 mencapai Rp5.288,01 miliar. Jika dirincikan, pendapatan negara berasal dari pajak dalam negeri sebesar Rp4.458,18 miliar, pajak perdagangan internasional Rp508,03 miliar dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp321,89 miliar. (mma/P7)